

KAPASITAS FISKAL LIMA PROVINSI NAIK, PAPUA BARAT TUMBUH TERTINGGI



Foto: bisnis.com / Wibi Pangestu Pratama

Enam provinsi mencatatkan penurunan tingkat kapasitas fiskal daerah pada 2021 dibandingkan dengan tahun lalu. Di sisi lain, terdapat lima provinsi yang tingkat kapasitas fiskalnya naik pada tahun ini, di antaranya Papua Barat yang naik dua tingkat. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 116/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). Aturan itu ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (31/8/2021) dan diundangkan satu hari setelahnya. Beleid itu menggantikan aturan sebelumnya, yakni PMK 120/2020 yang memetakan KFD pada tahun lalu.

Dalam aturan baru, Sri Mulyani menjabarkan indeks dan kategori terbaru KFD dari 34 provinsi. Berdasarkan PMK 116/2021, terdapat empat provinsi yang masuk kategori KFD sangat tinggi, lima provinsi kategori tinggi, delapan provinsi kategori sedang, delapan provinsi kategori rendah, dan sembilan provinsi di kategori sangat rendah. Jumlah provinsi di setiap kategorinya sama dengan yang ada pada tahun lalu. Meskipun begitu, terdapat perubahan indeks KFD dari sejumlah provinsi yang menyebabkan berubahnya kategori KFD provinsi tersebut. Bisnis mencatat bahwa terdapat enam provinsi yang tingkat kapasitas fiskalnya menurun dan lima provinsi yang mengalami kenaikan. Keenam provinsi yang mengalami penurunan KFD pada tahun ini, saat pandemi Covid-19 berlangsung, adalah Kalimantan Tengah dengan indeks KFD (IKFD) 0,392 atau termasuk dalam kategori rendah. Pada tahun lalu, provinsi itu memiliki IKFD 0,776 dengan kategori KFD sedang.

Lalu, terdapat Nusa Tenggara Timur yang pada tahun lalu memiliki IKFD 0,786 (sedang) dan turun menjadi 0,454 (rendah), Jambi yang tahun lalu 0,357 (rendah) turun menjadi 0,249 (sangat rendah), dan Sulawesi Tenggara yang tahun lalu 0,389 (rendah) dan turun menjadi 0,233 (sangat rendah). Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang kapasitas fiskalnya kurang, yakni pada tahun lalu 0,390 (rendah) dan tahun ini menjadi 0,269 (sangat rendah). Padahal, provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa memiliki kapasitas fiskal tinggi dan sangat tinggi.

Lima provinsi yang mencatatkan kenaikan KFD adalah Banten, yang tahun lalu 0,847 (sedang) lalu naik tahun ini menjadi 1,133 (tinggi). Terdapat Bali yang tahun lalu 0,533 (rendah) naik menjadi 0,461 (sedang), Aceh tahun lalu 0,220 (sangat rendah) naik menjadi 0,303 (sedang), dan Kepulauan Riau yang tahun lalu 0,244 (sangat rendah) lalu naik menjadi 0,368 (rendah). Papua Barat tercatat sebagai provinsi yang mencatatkan kenaikan KFD tertinggi, yakni pada tahun lalu 0,156 (sangat rendah) kemudian tahun ini menjadi 0,651 (sedang). Berbeda dengan empat provinsi lain yang naik satu kategori, kenaikan IKFD membuat Papua Barat naik dua kategori, dari sangat rendah menjadi sedang.

Pemerintah melakukan pemetaan KFD untuk memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah, tercermin dari pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. "Peta KFD dapat digunakan untuk pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah, penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah jika dipersyaratkan, dan/atau penggunaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tulis Sri Mulyani dalam PMK 116/2021. Berikut daftar kapasitas fiskal daerah 34 Provinsi di Indonesia berdasarkan PMK 116/2021 :

Provinsi	KFD
DKI Jakarta	Sangat Tinggi
Jawa Barat	Sangat Tinggi
Jawa Tengah	Sangat Tinggi
Jawa Timur	Sangat Tinggi
Sumatera Utara	Tinggi
Riau	Tinggi
Sumatera Selatan	Tinggi
Banten	Tinggi
Kalimantan Timur	Tinggi
Sumatera Barat	Sedang
Lampung	Sedang
Kalimantan Barat	Sedang
Kalimantan Selatan	Sedang
Sulawesi Selatan	Sedang

Bali	Sedang
Papua	Sedang
Papua Barat	Sedang
Aceh	Rendah
Kepulauan Riau	Rendah
Kalimantan Tengah	Rendah
Kalimantan Utara	Rendah
Sulawesi Utara	Rendah
Sulawesi Tengah	Rendah
Nusa Tenggara Barat	Rendah
Nusa Tenggara Timur	Rendah
Jambi	Sangat Rendah
Bangka Belitung	Sangat Rendah
DI Yogyakarta	Sangat Rendah
Sulawesi Tenggara	Sangat Rendah
Sulawesi Barat	Sangat Rendah
Maluku	Sangat Rendah
Maluku Utara	Sangat Rendah
Gorontalo	Sangat Rendah

Sumber Berita :

1. <https://bisnis.com/> , Kapasitas Fiskal Lima Provinsi Naik, Papua Barat Tumbuh Tertinggi, 17 September 2021, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021;
2. <https://beritamu.co.id/> , Kapasitas Fiskal Lima Provinsi Naik, Papua Barat Tumbuh Tertinggi, 17 September 2021, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021;
3. <https://siapgrak.com/> , Kapasitas Fiskal Lima Provinsi Naik, Papua Barat Tumbuh Tertinggi, 17 September 2021, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

Catatan :

- ❖ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, antara lain :
 - Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

- Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.
- Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk :
 - a. Pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah;
 - b. Penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan/atau
 - c. Penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan